



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia: Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM
(Persero) sebagai Alat Pengentas Kemiskinan (2015-2019)

Skripsi

Oleh

Reiva Areta Djoened Poesponegoro

6091801173

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia: Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM
(Persero) sebagai Alat Pengentas Kemiskinan (2015-2019)

Skripsi

Oleh

Reiva Areta Djoened Poesponegoro
6091801173

Pembimbing

Drs. Sapta Dwikardana M.Si., Ph.D

Bandung
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Reiva Areta Djoened Poesponegoro
Nomor Pokok : 6091801173
Judul : Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia: Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM
(Persero) sebagai Alat Pengentas Kemiskinan (2015-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 14 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Putu Agung Nara Indra, S.IP.,M.Sc.

: 

Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reiva Areta Dioened Poesponegoro
NPM : 6091801173
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan
Berkelanjutan Indonesia : Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM (Persero)
sebagai Alat Pengentas Kemiskinan (2015-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 31 Desember 2021

Tanda Tangan



Reiva Areta Djoened Poesponegoro

ABSTRAK

Nama : Reiva Areta Djoened Poesponegoro
NPM : 6091801173
Judul : Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia: Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM (Persero) sebagai Alat
Pengentas Kemiskinan (2015-2019)

Kredit mikro atau *microfinance* di kancah global menduduki panggung ketenaran dikarenakan keunikannya mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Memberikan kredit tanpa jaminan kepada rakyat miskin merupakan kemutakhiran kredit mikro. Sorotan ini juga mengundang kritik akademisi akan imbas sosial dibalik kesuksesan *microfinance*. Tidak terkecuali Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang menjawat kredit mikro di Indonesia. Kehadirannya sebagai agen percepatan pembangunan milik pemerintah memberikan ruang bagi penelitian ini. Pemetaan yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menempatkan PNM Mekaar sebagai agen pembiayaan pemberdayaan UMKM. Hal ini diperuntukkan pengupayaan pencapaian target RPJMN 2015-2019 Pemerintah Indonesia yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) global. Peneliti juga melihat adanya indikasi *social network* sebagai resep keberhasilan PNM Mekaar. Hal tersebut dianalisis lebih lanjut oleh Peneliti melalui lensa teori *The Social Capital* oleh Robert D. Putnam. Peneliti berhasil melihat ketepatan guna PNM Mekaar dalam mengentas kemiskinan di Indonesia. Hal ini didukung pula dengan beberapa temuan baru hasil penelitian ini. PNM Mekaar dapat dinyatakan sebagai inovasi *survival tools* kemiskinan di Indonesia. Posisinya sebagai program milik pemerintah dapat mengintegrasikan aksi filantropis dan kapasitas pemerintah, sehingga PNM Mekaar dapat mencapai keberhasilan yang signifikan. Ketepatan guna ini juga didukung dengan terbentuknya *civic virtue* menurut lensa *social capital* sebagai resep keberhasilan *microfinance*, PNM Mekaar.

Kata Kunci: kredit mikro, kemiskinan, TPB, permodalan, PT PNM (Persero), Mekaar, pembangunan berkelanjutan, percepatan pembangunan, *Social Capital*

ABSTRACT

Name : Reiva Areta Djoened Poesponegoro
Student ID : 6091801173
Title : *No Poverty in Indonesia's Sustainable Development: PT PNM (Persero)'s Mekaar Micro Credit as Poverty Alleviation Tools (2015-2019)*

Micro-credit or microfinance possesses fame in the global arena due to its uniqueness in poverty alleviation in developing countries. Providing credit with no collateral at stake for the poor, became micro-credits advancement. This also caught the attention of many scholars about the criticism regarding the social stakes behind microfinance's triumph. This including Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) by PT Permodalan Nasional Madani (Persero) whom wield micro-credit in Indonesia. Its presence as a state-owned development agent spares a gap for this paper to be conducted. Mapping designed by the Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) put PNM Mekaar as the MSME's empowerment financing agent. This effort is intended to attain RPJMN 2015-2019 goals that are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). Social network as the PNM Mekaar's key of success also can be seen by the researcher. This matter was then analyzed furthermore through the Social Capital lenses by Robert D. Putnam. Researcher managed to see PNM Mekaar's feasibility in poverty alleviation in Indonesia. Several findings from this paper also justified PNM Mekaar's feasibility. PNM Mekaar proved to be the innovation of Indonesia's poverty survival tools. PNM Mekaar was able to integrate the government's capacity while upholding the philanthropic values which boosted its significance of success. The construction of civic virtue carried out by the social capital lens, believed to be the catalyst of PNM Mekaar's success in the feasibility of poverty alleviation.

Keywords: micro-credit, poverty, SDGs, capital, PT PNM (Persero), Mekaar, sustainable development, acceleration development, Social Capital

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian pada skripsi yang berjudul “Tanpa Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Metode Kredit Mikro Mekaar PT PNM (Persero) sebagai Alat Pengentas Kemiskinan (2015-2019)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Maksud dari penyusunan skripsi ini ditunjukkan sebagai syarat kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) dan pemenuhan gelar penulis sebagai Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam bidang ekonomi politik internasional dan ekonomi politik dan pembangunan. Kerendahan hati juga Penulis rasakan dengan keterbatasan ilmu dan wawasan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan begitu, diharapkan adanya masukan dan kritik di hari depan nanti untuk perkembangan penulisan dan studi.

Bandung, Januari 2022



Reiva Areta Djoened Poesponegoro

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidaklah mungkin penyusunan skripsi ini akan tercapai bagi Penulis tanpa adanya bantuan dari kerabat dan pihak-pihak yang mendukung penulis dalam berjalannya skripsi. Mengingat hal tersebut, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidaklah kelancaran pengerjaan dari awal hingga akhir tanpa kehendak dan berkah-Mu.
2. Keluarga yang Penulis cintai, Ayah (Ari Wibowo Djoened Poesponegoro), Mommy (Maharis Arianti), Daddy (Irshad Pohan), Ibu (Mathilda Van Goebel), Adik-adik (M. Yashandana Pohan dan Dave Mahesa), Sepupu (Azalea Adinakiran), dan Eyangti (Titi Renaningsih), yang telah memberikan dukungan secara moral kepada penulis.
3. Mas Sapta Dwikardana M.Si., Ph.D, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mba Anggia Valerisha S.IP., M.Si., selaku dosen wali yang telah banyak membimbing penulis sejak awal perkuliahan.
5. Seluruh Tim Biro Direksi Corporate Secretary PT PNM (Persero), Mba Kezia Hadi, Ibu Yani, Mba Meita, Mas Ronald, dan Mas Fella, yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penelitian dan observasi PNM Mekaar untuk penyusunan skripsi ini.

6. Sahabat Penulis, Dini Putri Achmadi, Naritha Cahya, Nalisya Anabel, Lili Julianti, Ilham Nashrullah, Patrick Gregorious, yang berada di sisi Penulis dari suka maupun duka hingga di akhir penelitian.
7. Sahabat dan kawan seperjuangan di UNPAR, Junetta Adzra, Bernadeth Franchika, Esterina Putri, Amalika Ainnaya, Renaldi Stevanus, Raynard Christian, yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan.

Bandung, Januari 2022



Reiva Areta Djoened Poesponegoro

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR AKRONIM | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.2.1 Deskripsi Masalah | 5 |
| 1.2.2 Pembatasan Masalah | 9 |
| 1.2.3 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 12 |
| 1.4 Kajian Literatur | 12 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran | 22 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 1.6.1 Metode Penelitian | 32 |
| 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 35 |
| BAB II. KIAT KREDIT MIKRO PNM MEKAAR DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL INDONESIA | 37 |
| 2.1 PNM Mekaar sebagai “Survival Tools” Kemiskinan di Indonesia | 38 |
| 2.1.1 PNM Mekaar sebagai Inovasi Perbankan | 42 |
| 2.2 Elemen PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Induk PNM Mekaar | 46 |
| 2.2.1 <i>Strategy</i> | 46 |
| 2.2.2 <i>Structure</i> | 49 |
| 2.2.3 <i>System</i> | 51 |
| 2.2.4 <i>Shared Values</i> | 53 |

| | | |
|--|---|------------|
| 2.2.5 | <i>Style</i> | 55 |
| 2.2.6 | <i>Staff</i> | 55 |
| 2.2.7 | <i>Skills</i> | 57 |
| 2.3 | PNM Mekaar dalam Agenda Pembangunan Indonesia | 58 |
| 2.3.1 | Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Indonesia..... | 59 |
| 2.3.2 | Kajian Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM | 60 |
| 2.3.3 | Konsep Peranan PNM Mekaar dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia | 62 |
| 2.4 | Tipologi <i>Social Capital</i> PNM Mekaar | 66 |
| BAB III. UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KREDIT MIKRO PNM MEKAAR DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDONESIA..... | | |
| | | 71 |
| 3.1 | <i>Civic Virtue</i> Gol Kredit Mikro PNM Mekaar | 72 |
| 3.1.1 | Dinamika <i>Social Networking</i> dalam PNM Mekaar | 73 |
| 3.2 | Tantangan Pengentasan Kemiskinan Kredit Mikro PNM Mekaar di Indonesia | 89 |
| 3.2.1 | Tantangan Kredit Mikro: Dinamika Sosial Nasabah dalam PNM Mekaar | 89 |
| 3.3 | Peran PNM Mekaar dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia .. | 99 |
| 3.4 | Kesehatan Keuangan Permodalan PNM Mekaar <i>Data Envelopment Analysis</i>..... | 105 |
| BAB IV. KESIMPULAN..... | | |
| | | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | |
| | | 115 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Kategorisasi Peran PNM Mekaar | 65 |
| Tabel 3.1 <i>Input</i> dan <i>Output</i> PNM Mekaar | 108 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Grafik Anggaran Program Pementasan Kemiskinan dan Angka Kemiskinan | 7 |
| Gambar 1.2 Bagan Konsep <i>The Social Capital</i> | 29 |
| Gambar 2.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 1970-2017 | 39 |
| Gambar 2.2 Strategi Bisnis PT PNM: Mekaar, ULaMM, dan PKU | 48 |
| Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT PNM (Persero) | 59 |
| Gambar 2.4 Struktur Perusahaan PT PNM (Persero) | 50 |
| Gambar 2.5 Skema Pembiayaan PNM Mekaar | 53 |
| Gambar 2.6 Peta Program Pemberdayaan UMKM Unggulan TNP2K | 61 |
| Gambar 2.7 Tabel Tipologi Peran Keuangan Mikro | 64 |
| Gambar 3.1 Modul Pemberdayaan PNM Mekaar | 76 |
| Gambar 3.2 Temu Nasabah PKU | 77 |
| Gambar 3.3 Klasterisasi Pelatihan PKU | 78 |
| Gambar 3.4 Proses Pembayaran Angsuran Nasabah Mekaar | 82 |
| Gambar 3.5 Pertumbuhan Nasabah | 83 |
| Gambar 3.6 Bagan Analisis <i>The Social Capital</i> terhadap PNM Mekaar..... | 88 |
| Gambar 3.7 Tabel Pertanyaan Survei | 97 |
| Gambar 3.8 Tabel Jawaban Survei | 98 |
| Gambar 3.9 <i>Social Re-engineering</i> PKM PNM Mekaar | 100 |
| Gambar 3.10 Dokumentasi PKM Cabang dengan BoD & BoC..... | 101 |
| Gambar 3.11 Dokumentasi 2 PKM Cabang dengan BoD & BoC..... | 101 |
| Gambar 3.12 Rasio untuk Keuangan Mikro | 107 |

DAFTAR AKRONIM

| | |
|------------------|---|
| 7-S | : <i>7-S (framework)</i> , Melambangkan 7 “S” elemen. |
| AO | : <i>Account Officer</i> |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| BoC | : Board of Commissioners |
| BoD | : Board of Directors |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| DEA | : <i>Data Envelope Analysis</i> |
| IPM | : Indeks Pembangunan Manusia |
| KAM | : Kepala Area Mekaar |
| KC | : Kepala Cabang |
| KUR | : Kredit Usaha Rakyat |
| Mekaar | : Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera |
| NoA | : <i>Number of Account</i> |
| NGO | : <i>Non-governmental Organization</i> |
| NPL | : <i>Non-performing Loan</i> |
| PAR | : <i>Portfolio at Risk</i> |
| PT PNM (Persero) | : PT Permodalan Nasional Madani (Persero) |
| PKM | : Pertemuan Kelompok Mingguan |
| PKU | : Pengembangan Kapasitas Usaha |
| SAO | : <i>Senior Account Officer</i> |
| SEO | : <i>State-owned Enterprise</i> |

| | |
|-------|---|
| SDGs | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SMEs | : <i>Small Medium Enterprises</i> |
| ST | : <i>Stakeholder</i> |
| TNP2K | : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| TJSL | : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan |
| TPB | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| UMKM | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| UMK | : Usaha Kecil dan Menengah |
| ULaMM | : Unit Layanan Modal Mikro |
| RPJMN | : Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit mikro menjadi begitu “seksi” di mata ekonomi global sejak era 90-an.¹ Disebut sebagai salah satu inovasi perbankan dikarenakan kredit mikro hadir dengan keunikan metode peminjamannya. Nasabah dapat melakukan peminjaman dengan nominal mikro (sangat kecil) tanpa agunan. Tidak dipungkiri pula, metode ini berdampak signifikan pada penekanan angka kemiskinan di negara *Global South*. Kemutakhiran ini yang kemudian menyita perhatian global. Kredit mikro menjadi dielu-elukan sebagai strategi pamungkas pengurangan kemiskinan. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, juga mengakui keefektifitasan kredit mikro dalam pengurangan angka kemiskinan, terutama di negara bagian ke-3.²

Dipopulerkan oleh Muhammad Yunus, pendiri The Grameen Bank, kredit mikro berbicara sendiri soal kesuksesannya.³ Tidak mudah pula bagi Yunus untuk membangun Grameen Bank di tengah kekeruhan politik yang terjadi di Bangladesh. Awal era 90-an merupakan masa yang paling sulit bagi Grameen Bank. Pendanaan pinjaman yang bergantung subsidi pemerintah berujung pada

¹ Milford Bateman, Stephanie Blankenburg, and Richard Kozul-Wright, *The Rise and Fall of Global Microcredit: Development, Debt and Disillusion* (London: Routledge, 2019), hal. 3.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

bumerang.⁴ Sekatan ini bukan menjadi pembatas ruang gerak Grameen Bank untuk tumbuh. Terbukti dari akhir era 90-an, Grameen Bank tumbuh secara pesat dengan berbagai kesuksesannya.

Grameen Bank berhasil menunjukkan keberhasilan kredit mikro kepada dunia. Pada akhir 1998, Grameen Bank berhasil menyediakan pinjaman sebesar US\$3,9 juta.⁵ Upaya ini dilakukan Grameen Bank secara independen dengan hanya 7% saham milik Pemerintah Bangladesh.⁶ Grameen Bank juga memberikan dukungan kepada penduduk miskin melalui fasilitas kesehatan, akses kepada teknologi, dan pemberdayaan.⁷ Hingga tahun 2006, Yunus dinobatkan sebagai pemenang The Nobel Peace Prize melalui karyanya The Grameen Bank.⁸ Berbagai pencapaian ini semakin menarik atensi global pada kredit mikro.

Dunia tidak tutup mata, kredit mikro juga memicu *global efforts* dengan adanya The Microcredit Summit Campaign tahun 2006.⁹ Kesuksesan kredit mikro berdampak pada menjamurnya kemunculan institusi pendanaan mikro. Ada sebuah dorongan dari institusi-institusi tersebut untuk melakukan upaya bersama dalam kesuksesan kredit mikro di taraf global. Mulai dari strategi, akses, dan ekspansi, merupakan hal-hal yang dapat disempurnakan secara kolektif. Keselarasan dan sikap saling melengkapi ini kemudian membawa kredit mikro dalam upaya global yang berkelanjutan.

⁴ Muhammad Yunus and Alan Jolis, *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty* (New York, NY: PublicAffairs, 2007), hal. 373.

⁵ *Ibid.*, hal. 440.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 409-436.

⁸ "The Nobel Peace Prize 2006 – Grameen Bank," Bank for the Poor, <https://grameenbank.org/the-nobel-peace-prize-2006/>. Diakses pada 17 April 2021.

⁹ Philip Smith and Eric Thurman, *A Billion Bootstraps: Microcredit, Barefoot Banking, and the Business Solution for Ending Poverty* (New York: McGraw-Hill, 2007), hal. 182.

Peran kredit mikro dalam pilar pembangunan dunia juga tercermin dari *global efforts* gol Agenda Keberlanjutan Pasca-2015, “*The Future We Want*”.¹⁰ **Tujuan Nomor 1 Tanpa Kemiskinan (target ke-5)** berusaha untuk menciptakan ketahanan komunitas, terutama dalam masyarakat miskin.¹¹ Dilanjutkan dengan **Tujuan Nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (target ke-3)** yakni mendorong pertumbuhan UMKM dan UMK dengan akses permodalan dan pemberdayaan.¹² **Dilengkapi dengan Tujuan Nomor 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (target ke-3)** dalam upaya kemudahan akses bagi perusahaan kecil dalam jasa keuangan dan kredit, terutama di negara berkembang.¹³ Gol ini kemudian menunjukkan kesadaran dunia akan pentingnya institusi pendanaan dan pemberdayaan kepada penduduk miskin.

Pemerintah Indonesia pun turut mengusahakan pembangunan secara berkelanjutan melalui kredit mikro PNM Mekaar. Melanjutkan upaya dalam **Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)** merancang **Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM**.¹⁴ Pemetaan ini dilakukan guna mengentas kemiskinan demi percepatan lajut pembangunan di Indonesia. Program milik PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ini menjawat kredit mikro sebagai spesialisasinya. Namun, peranan

¹⁰ Qian-Qian Liu, Man Yu, and Xiao-Lin Wang, “Poverty Reduction within the Framework of Sdgs and Post-2015 Development Agenda,” *Advances in Climate Change Research* 6, no. 1 (2015), hal. 68

¹¹ “Tujuan-1,” BERANDA. <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-1/>. Diakses pada 4 Oktober 2021.

¹² “Tujuan-8,” BERANDA. <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. Diakses pada 4 Oktober 2021.

¹³ “Tujuan-9,” BERANDA. <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-9/>. Diakses pada 4 Oktober 2021.

¹⁴ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *2019 Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: TNP2K.

PNM Mekaar sebagai agen pembangunan pemerintah berbeda dengan institusi kredit mikro lainnya. Umumnya organisasi kredit mikro terbentuk sebagai lembaga non-pemerintah. Terdapat argumen transparansi sistem kredit mikro akan lebih baik dengan pendanaan diluar intervensi pemerintah. Fakta akan kegagalan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah juga menambah bumbu-bumbu keraguan pada peranan PNM Mekaar. Tentunya dengan segala celah yang menimbulkan pertanyaan, Peneliti akan melihat bagaimana peranan pengentasan kemiskinan kredit mikro PNM Mekaar dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis peranan dan upaya PNM Mekaar dalam mengentas kemiskinan di Indonesia melalui sistem kredit mikronya.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Munculnya PNM Mekaar juga menimbulkan banyak pertanyaan. Terdapat empat poin anomali yang menarik bagi Peneliti untuk dianalisis.

PNM Mekaar sebagai State-owned Enterprises (SMEs) Microfinance

Setelah dipopulerkan oleh Yunus, kredit mikro muncul dengan sisi protagonis lembaga non-pemerintah.¹⁵ Yunus sendiri menceritakan bagaimana keberlangsungan Grameen Bank justru dirugikan dengan intervensi pemerintah.¹⁶ Kredit mikro bahkan umumnya juga hadir sebagai *survival tools* krisis moneter akibat pemerintah. Transparansi akan upaya penurunan kemiskinan juga kerap diragukan.

Hal ini disuarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) di tahun 2018.¹⁷ Peralpnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, pendataan masyarakat miskin oleh BPS dilakukan setelah pembagian bansos.¹⁸ Fakta tersebut menjadikan manipulasi statistik angka kemiskinan di Indonesia. Transparansi dan upaya *grassroot* merupakan elemen dasar sistem kredit mikro. Sedangkan, PNM Mekaar merupakan sebuah program bisnis PT PNM (Persero) yang mengartikan 100% program milik pemerintah. Negasi

¹⁵ Muhammad Yunus and Karl Weber, *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2011), hal. 21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mesha Mediani, "INDEF Kritik Data Pemerintah Soal Angka Kemiskinan," nasional, 20 Juli 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720220145-20-315869/indef-kritik-data-pemerintah-soal-angka-kemiskinan>. Diakses pada 26 Desember 2021.

¹⁸ *Ibid.*

identitas PNM Mekar dan bentuk ideal kredit mikro menjadi unik untuk dilihat lebih dalam.

Isu Penuntasan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia dalam Percepatan Pembangunan di Indonesia

Krisis tahun 1996-1998 memperkenalkan Indonesia dengan akrabnya kemiskinan.¹⁹ Dipicu akan krisis ekonomi atau “Krisis Moneter 98” semasa itu semakin memperlihatkan Indonesia pada realita pahit. Pemerintah Indonesia tentunya semakin gencar memerangi kemiskinan sejak itu. Kegentingan ini juga semakin dirasa dengan relevansi kemiskinan dan laju pembangunan. Menurut TNP2K, angka kemiskinan memiliki hubungan erat sebagai “syarat mutlak” kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.²⁰ Kesadaran ini juga nampak pada perkembangan metode pengukuran kemiskinan setelah tahun 1998.²¹

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya penuntasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.²² Terlebih lagi sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada produktivitas UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan. Terutama dalam program pemberdayaan dan pembiayaan UMKM yang terefleksi di RPJMN 2015-2019. Namun, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya upaya pengentasan pemerintah dipertanyakan dampaknya. Portfolio kegagalan alat pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia tidak sedikit untuk

¹⁹ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *2019 Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: TNP2K.

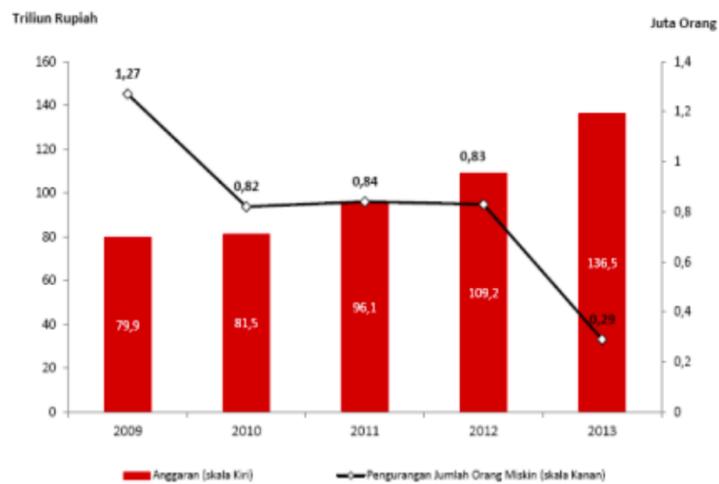
²⁰ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan*, 2020, Jakarta: TNP2K.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dibahas. Terlihat dari begitu banyak dan alokasi anggaran yang cukup besar tidak sebanding dengan hasil penekanan angka kemiskinan. Sepintas hal ini dibuktikan melalui grafik di bawah ini.

Gambar 1.1 Grafik Anggaran Program Pegentasan Kemiskinan dan Angka Kemiskinan



Sumber: Pusat Kajian APBN (2014)

Merujuk pada Gambar 1.1 terlihat tidak konsistennya program pengentasan kemiskinan dan dampaknya pada penurunan angka kemiskinan. Dapat dilihat di tahun 2010-2012 angka kemiskinan stagnan dengan adanya kenaikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Ketidakselarasan ini juga terlihat pada tahun 2012-2013. Kenaikan anggaran yang terjadi pada tahun 2013 tidak sebanding dengan drastisnya penekanan angka kemiskinan. Jenjang anggaran tidak terlalu jauh daripada tahun 2012, namun angka kemiskinan turun drastis.

Grafik ini memperlihatkan tidak maksimalnya strategi dan alat pengentasan yang diberlakukan semasa sebelum tahun 2013 tersebut.

Berbicara mengenai upaya pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan pemerintah untuk menjangkau produktivitas rakyat juga dinilai kurang berhasil. Permodalan KUR dimulai pada tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia menargetkan pemilik UMKM yang belum *bankable*.²³ Tanpa agunan, masyarakat dapat mengakses pinjaman dari KUR. Namun, persyaratan di samping itu justru menciptakan sekatan antar penduduk miskin dengan KUR. Peminjam wajib memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan.²⁴ Tentu syarat ini tidak *feasible* dengan kemampuan penduduk miskin yang belum memiliki usaha.

Permasalahan yang kemudian muncul juga terjadi pada ketimpangan sektor UMKM peminjam KUR.²⁵ Pengembalian pinjaman diberlakukan syarat dalam jangka waktu 6 bulan. Peminjam di pedesaan kebanyakan memiliki diversifikasi usaha dalam bidang pertanian. Dibutuhkan waktu panen dan pengolahan yang pastinya lebih dari 6 bulan. Tentu syarat pengembalian pinjaman tidak dapat terpenuhi. Terbukti pada akhirnya kesuksesan KUR hanya ada pada mereka di bidang perdagangan. Ketimpangan ini menyudutkan KUR dalam upayanya mencakup penduduk miskin di Indonesia.

²³ Admin, "Kur," KUR • Maksud Dan Tujuan, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan#:~:text=Program%20KUR%20secara%20resmi%20diluncurkan,UMKM%20individu%2Fp%20erseorangan%2C%20badan%20usaha>. Diakses pada 13 Oktober 2021.

²⁴ CNN Indonesia, "Syarat-Syarat UMKM Mengajukan Kur," ekonomi, November 12, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112173938-78-447718/syarat-syarat-umkm-mengajukan-kur>. Diakses pada 13 Oktober 2021.

²⁵ Agus Triyono, "Percuma Bunga Turun Kalau Kur Sulit Ditembus Pelaku UMKM," ekonomi, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191113095915-78-447891/percuma-bunga-turun-kalau-kur-sulit-ditembus-pelaku-umkm>. Diakses pada 13 Oktober 2021.

Melanjutkan upaya penekanan angka kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, TNP2K mendirikan pemetaan tentang pemberdayaan UMKM di Indonesia.²⁶ Pada pemetaan tersebut, TNP2K menempatkan PNM Mekaar sebagai agen pembiayaan pemberdayaan UMKM.²⁷ Kegagalan upaya pemerintah dan kesukaran KUR menekan kemiskinan menyisakan **pertanyaan** bagaimana nasib kredit mikro PNM Mekaar. Bagaimanakah peranan PNM Mekaar agar tidak berujung pada kegagalan program pemerintah? Hal tersebut menjadi celah penelitian yang sangat menarik untuk digali lebih dalam. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan analisis akan peranan pengentasan kemiskinan PNM Mekaar dalam percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di samping itu, Peneliti memiliki hipotesis bahwa PNM Mekaar berhasil mendorong laju percepatan pembangunan Indonesia dengan pengentasan kemiskinan melalui kredit mikronya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Demi menghasilkan penelitian yang komprehensif, analisis ini akan dibatasi mulai dari tahun 2015-2019. Secara sederhana alasan pertama adalah kehadiran RPJMN Tahun 2015-2019 di bawah Pemerintahan Jokowi yang kerap menaruh perhatian pada UMKM. Adapula tahun 2015 menjadi kali pertama Mekaar diresmikan sebagai program PT PNM (Persero).²⁸ Pada tahun 2019 terdapat

²⁶ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *2019 Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: TNP2K.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero), "PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah," PNM, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>. Diakses pada 19 April 2021.

lonjakkan *outstanding* hingga 188,6%.²⁹ Selain *outstanding*, terdapat juga penambahan sekitar 300 unit cabang Mekaar baru yang tersebar di Indonesia.³⁰ Hal ini menjadi penanda adanya kesuksesan implementasi Mekaar di Indonesia pada tahun 2019. Maka dari itu dalam batas waktu penelitian 4 tahun (2015-2019), Peneliti akan mencoba menemukan berbagai elemen yang mendukung dan menghambat implementasi sistem Grameen Bank dalam Mekaar.

Pembahasan yang akan dilakukan juga dibatasi pada sistem bisnis dan sosial kredit mikro. Isu gender kerap menjadi pembahasan dalam penelitian kredit mikro. Hal ini dikarenakan target utama nasabah kredit mikro adalah wanita. Peneliti sadar betul akan adanya permasalahan gender dalam kredit mikro. Tidak sedikit referensi penulisan ini membahas permasalahan gender. Namun, terkhusus penulisan ini dirasa belum dapat melibatkan isu gender lebih lanjut. Maka, penulisan ini akan memfokuskan elemen yang sudah ditentukan dalam penelitian tanpa mendiskreditkan adanya isu gender di dalamnya.

²⁹ PNM | PT Permodalan Nasional Madani (Persero), “Pinjaman PNM Melesat 188,6% Hingga April 2019,” PNM, <https://www.pnm.co.id/news/pinjaman-pnm-melesat-188-6-hingga-april-2019>. Diakses pada 19 April 2021.

³⁰ *Ibid.*

1.2.3 Rumusan Masalah

Berkaca dari upaya pembangunan berkelanjutan Bangsa Indonesia dalam mengentas kemiskinan dengan keunikan sistem permodalan PNM Mekaar menggiring Peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian dalam karya ini yakni, **“Bagaimana peranan kredit mikro Program Mekaar PT PNM (Persero) sebagai alat pengentas kemiskinan di Indonesia dalam percepatan pembangunan berkelanjutan negara pada tahun 2015-2019?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah dengan tujuan memberikan hasil penelitian akademik mengenai peranan pengentasan kemiskinan PNM Mekaar dalam agenda pembangunan berkelanjutan Pemerintah Indonesia. Temuan ini akan memberikan pandangan akademik tentang peranan sesungguhnya PNM Mekaar dalam menekan kemiskinan. Temuan ini juga akan memberikan dukungan dari perspektif ekonomi politik internasional bahwa sistem kredit mikro dapat menjadi model pamungkas alat penuntasan akar kemiskinan di negara-negara berkembang. Dalam mencari tahu lebih lanjut, Peneliti juga akan menggunakan kerangka teori *The Political Stakeholder* dan *The Social Capital* sehingga secara kualitatif akan memberikan penjelasan peranan PNM Mekaar secara tepat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hadirnya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran peranan metode kredit mikro PNM Mekaar sebagai alat pengentas kemiskinan di negara-negara berkembang. Model ini dapat kemudian menjadi sebuah cetakan program tepat guna akan kolaborasi sistem kredit mikro dalam badan pemerintah. Diharapkan, PNM Mekaar juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan usahanya. Peneliti juga berharap penulisan ini bermanfaat sebagai referensi penelitian dikemudian hari yang berkesinambungan.

1.4 Kajian Literatur

Tentunya sangat dibutuhkan kajian literatur untuk memberikan gambaran secara komprehensif karya-karya tulis dalam payung topik serupa. Gambaran ini dapat berfungsi untuk memberikan dukungan literatur dalam penelitian yang akan dilakukan. Dukungan ini dapat berupa penelitian yang berkesinambungan atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, tinjauan mengenai literatur sebelumnya juga dapat membantu melengkapi kekurangan pada penulisan ini. Terutama dalam topik ini, terdapat beberapa literatur yang dapat membantu memberikan gambaran mengenai pembangunan berkelanjutan dalam mengentas kemiskinan dan sistem kredit mikro sebagai pemberdayaan komunitas:

Gary M. Woller dan Warner Woodworth - *Microcredit as a Grass-Roots Policy for International Development*³¹

Woller dan Woodworth memiliki ketertarikan dalam penelitiannya akan kredit mikro sebagaimana dampaknya terhadap penduduk miskin dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena kesadarannya dalam ketenaran penggunaan sistem kredit mikro belakangan ini. Dunia dilihat mulai menyadari kegagalan akan sistem *top-down* yang berdampak pada ketimpangan rantai pasok global. Hingga pada akhirnya strategi-strategi *grass-roots* lebih terlihat signifikansinya. Kredit mikro adalah salah satunya.³²

Argumen yang kemudian dimunculkan adalah bagaimana secara *grassroots*, kredit mikro dapat menangani kegagalan kebijakan pembangunan secara makro. Bantuan Organisasi Non-Pemerintah (*NGO*) dan memiliki peran penting dalam memberikan paradigma baru akan keberhasilan metode *grassroots*. Hal ini juga dilakukan dari berbagai sektor; ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kredit mikro kemudian diimplementasikan dan membuahkan harapan baru. Terutama kepada “negara bagian ke-3”, hal ini menciptakan gerakan yang berproliferasi ke negara berkembang lainnya.

Kredit Mikro kemudian menjadi sebuah metode *grassroots* yang tidak hanya berdampak, tetapi membentuk gerakan kolektif yang baik. Keselarasan penelitian ini membuat Peneliti yakin akan hipotesisnya mengenai keberhasilan kredit mikro. Hal ini dikarenakan pandangan kredit mikro sebagai metode *grassroots*

³¹ Shahidur R. Khandker, Baqui Khalily, and Zahed Khan, *Grameen Bank: Performance and Sustainability* (Washington, DC: World Bank, 1997).

³² *Ibid*, hal. 267.

yang tepat guna. Akan tetapi Woller dan Woodworth belum banyak membahas mengenai skenario jika program ini dilakukan oleh pemerintah negara itu sendiri.

Douglas R. Snow and Terry F. Buss - *Development and the Role of Microcredit*³³

Studi menarik dipaparkan Snow dan Buss dalam upaya pembuktiannya korelasi kredit mikro terhadap keberlangsungan ekonomi, dalam studi kasusnya yakni Negara Benua Afrika. Keduanya melihat bahwa perlu diakui sistem kredit mikro merupakan sebuah inovasi agen pembangunan dunia. Institusi internasional seperti UNDP dan World Bank juga menyetujui hal tersebut. Dibuktikan dengan pengadaan *grants* atau donor kepada Afrika dalam jasa keuangan kredit mikro untuk masyarakatnya. Eksistensi metode ini juga dinilai dapat menghubungkan sektor formal (ekonomi) dan informal (sosial-budaya) di dalam masyarakat.

Snow dan Buss dalam penelitiannya memiliki argumen akhir akan implementasi kredit mikro hanya akan berhasil dengan desain program yang baik dan tepat. Keduanya melihat kredit mikro dapat dimanfaatkan sebagai “pembenah kegagalan pemerintah”. Pada penelitiannya 133 perusahaan di Ghana membutuhkan pinjaman. Akan tetapi pemerintah tidak memiliki kapabilitas dalam menyediakan hal tersebut. Terlebih lagi bagi usaha mikro yang hanya mampu meminjam modal dengan jumlah kecil.

³³ Douglas R. Snow and Terry F. Buss, “Development and the Role of Microcredit,” *Policy Studies Journal* 29, no. 2 (2001), hal. 296-307.

Kehadiran kredit mikro tentu dapat menjadi solusinya. Namun, masih kuatnya institusi perbankan tradisional menjadi salah satu hambatan dalam memposisikan jasa keuangan kredit mikro. Perlu adanya penyesuaian keterbukaan ekonomi makro agar metode ini dapat berjalan. Maka dari itu, ketepatan dalam penyalarsan program kredit mikro juga menunjukkan kesuksesannya dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian Snow dan Buss sudah cukup baik dalam menekankan pemetaan kredit mikro yang baik agar berhasil. Tetapi pembahasan mengenai peran pemerintah tidak terlalu ditonjolkan dalam penelitian ini. Dalam studi kasus Afrika, peranan Organisasi Non-Pemerintah (*NGO*) lebih menonjol.

Shahidur R. Khandker, Baqui Khalily, Zahed Khan - *Grameen Bank: Performance and Sustainability*³⁴

Khandker dan kawan-kawan secara optimis berargumen dalam buku ini bahwa kredit mikro rancangan Grameen Bank dinyatakan berhasil memangkas kemiskinan masyarakat pedesaan di Bangladesh. Permasalahan yang diutarakan dalam buku ini adalah ketepatan metode peminjaman *group viability* serta ‘harga’ yang harus dipertanggungjawabkan dan *sustainability* dalam Grameen Bank sebagai agen sosio-ekonomi. Khandker dan kawan-kawan menggarisbawahi latar belakang Muhammad Yunus mendirikan The Grameen Bank adalah sebagai kontestan baru yang menantang eksistensi kredit dengan agunan atau perbankan konvensional. Metode ini dibentuk atas dasar ketersediaan kredit yang dapat menjadi katalis peniadaan pergerakan ekonomi negara berkembang. Maka dari itu,

³⁴ Shahidur R. Khandker, Baqui Khalily, and Zahed Khan, *Grameen Bank: Performance and Sustainability* (Washington, DC: World Bank, 1997).

menyediakan kredit bagi masyarakat miskin-pedesaan dapat membantu meringankan kemiskinan.

Untuk melihat apakah Grameen Bank dapat menuntaskan kekhawatiran yang diuraikan sebelumnya, Khandker dan kawan-kawan menjelaskan secara kualitatif kelangsungan operasional kredit. Terdapat dua kunci kesuksesan dalam operasional kredit Grameen Bank; monitoring berkala yang ketat dan keunikan transparansi. Peminjaman ini dilakukan secara berkelompok dan dengan satu anggota sebagai penanggung jawab kelancaran pinjaman di kelompok tersebut. Secara konsensus, tiap-tiap kelompok akan menentukan waktu rutin untuk berkumpul membicarakan peminjaman, usaha, dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Namun, tidak sedikit disebutkan adanya penunggakan atau '*default*' dari sistem kredit yang dilakukan Grameen Bank. Persentase yang disertakan memang sangat kecil jika dibandingkan dari persentase keberhasilannya. Khandker dan kawan-kawan tidak menjelaskan secara spesifik apa yang kemudian dilakukan Grameen Bank dalam memangkas kredit macet. Argumen-argumen yang dikeluarkan kemudian terlihat terlalu mengglorifikasi metode Grameen Bank. Selain itu, tidak sedikit adanya pernyataan metode ini sangat baik sebagai kerangka yang dapat direplika negara berkembang lain dalam pengentasan kemiskinan. Khandker dan kawan-kawan menyebutkan negara seperti Malaysia telat mengimplementasikan ini secara baik. Tetapi perlu diingat bagaimana Yunus mempraktikkan ini secara sangat kontekstual di Bangladesh. Khandker tidak

menjelaskan lebih jauh apa yang sekiranya dapat diterapkan dan tidak dapat diterapkan di negara berkembang lainnya.

Lamia Karim - *Demystifying Micro-Credit: The Grameen Bank, NGOs, and Neoliberalism in Bangladesh*³⁵

Jurnal ilmiah oleh Lamia Karim memberikan pandangan yang sangat pesimis terhadap eksistensi kredit mikro melalui kerangka Neoliberalisme dan Globalisasi *grass-root*. Premis besar yang diutarakan Karim adalah operasional GB mendukung Neoliberalisme yang menganggap kebaikan pasar tanpa banyak campur tangan pemerintah dan juga GB yang kemudian memperkenalkan sistem kredit kepada rumah tangga patriarkhal, dimana hal tersebut menggambarkan globalisasi *grass-root*, mendukung sebuah kedaulatan baru di bawah bayang-bayang pemerintah. Karim secara komprehensif memberikan argumen pada pernyataannya dengan menganalisis Grameen Bank secara kualitatif dengan kerangka '*micro-credit and the economy of shame*'.

Economy of shame, menurut Karim adalah jawaban dari *safety net* yang menggantikan aset sebagai jaminan kredit. Secara sekilas, target kelompok GB yang menyasar wanita terlihat sebagai bentuk pemberdayaan berskala besar. Akan tetapi Karim memberikan pandangan yang kontradiktif dari pemberdayaan itu sendiri. Selain rumah tangga yang patriarki, kehidupan di pedesaan Bangladesh masih sangat *superficial*, sehingga nilai-nilai ketuhanan masih sangat melekat. Akibat hal tersebut, wanita dianggap sebagai simbolik dari kehormatan sebuah

³⁵ Lamia Karim, 2008, *Demystifying Micro-Credit*. *Cultural Dynamics*, 20 (1), hal. 5–29.

keluarga. Keadaan ini menjadikan wanita-wanita tersebut enggan tidak membayar hutang atau melakukan kecurangan. Terlebih lagi sistem yang diberlakukan dalam melakukan peminjaman adalah secara berkelompok. Maka dari itu, Karim melihat *economy of shame* sebagai jaminan sebenarnya sistem kredit mikro Grameen Bank.³⁶

Argumen Karim yang diutarakan menjadi sangat menarik dalam menambah pandangan kritis pada penelitian ini. Terutama dalam melihat seberapa formula Yunus dalam membangun Grameen Bank sangat kontekstual di Bangladesh. Namun, beberapa argumen Karim masih terkesan sangat asumptif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemaparan data atau dukungan narasi dari wanita peminjam di GB yang merasakan hal serupa. Apakah betul wanita di pedesaan Bangladesh tersebut merasakan bahwa kewajiban ia membayar pinjaman karena rasa malu? Ataukah hal tersebut hanya asumsi Karim belaka?

Richard Montgomery - *Disciplining or Protecting the Poor? Avoiding the Social Costs of Peer Pressure in Micro-credit Schemes.*³⁷

Melakukan studinya di Bangladesh dan Sri Lanka, Montgomery menemukan ancaman sosial bagi para penduduk miskin yang melakukan pinjaman pada jasa kredit mikro. Memiliki nuansa yang mirip dengan literatur Karim sebelumnya, Montgomery mempertanyakan aspek “solidaritas” dan “kepercayaan” pada sistem *group viability* yang dijalankan oleh kredit mikro. Perlu dilihat konteks

³⁶ Lamia Karim, 2008, *Demystifying Micro-Credit. Cultural Dynamics*, 20 (1), hal, 10

³⁷ Muhammad Kashif Khan Durrani et. al, “*Role of Micro Finance in Reducing Poverty: A Look at Social and Economic Factors*”, *International Journal of Business and Social Science* 2, Isu 21 (2011).

kemiskinan yang terjadi dalam suatu komunitas cukup beragam dan kompleks (kemiskinan multidimensional). Keadaan tersebut menjadikan sebuah anomali dalam keadaan ideal “solidaritas” sebuah kelompok. Jika dinamika kemiskinan tersebut begitu beragam, bagaimana sebuah kelompok peminjam dapat berdinamika dengan baik? Montgomery kemudian menemukan sebuah *clash* dalam hal tersebut.³⁸

Montgomery berargumen bahwa sistem kredit mikro harus betul-betul diselaraskan dengan kebutuhan komunitas miskin. Penemuannya memperlihatkan sebuah dinamika yang terjadi jika sebuah kelompok memiliki latar belakang yang heterogen. Hal tersebut akan membentuk sebuah “*peer pressure*” dalam kelompok peminjam atau nasabah. Tentunya ancaman ini akan menimbulkan sebuah stres dalam dinamika sosial masyarakat tersebut. Jika ini terjadi, kredit macet tentunya akan terjadi. Skenario ini kemudian menjadikan kredit mikro semacam bumerang untuk kemiskinan.³⁹

Menghindari terjadinya disrupsi sistem kredit mikro, Montgomery menawarkan solusi dengan dibentuknya sebuah parameter dan alat yang ajek untuk melindungi komunitas miskin tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan betul-betul peningkatan kualitas *account officer* yang kerap mendampingi komunitas di lapangan. Pandangan ini cukup menarik bagi penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini. Adanya kecenderungan penggantian aset “sosial” yang diwajibkan sebagai agunan. Kemudian pemantauan intensif yang perlu dilakukan agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

³⁸ Richard Montgomery, “Disciplining or Protecting the Poor? Avoiding the Social Costs of Peer Pressure in Micro-Credit Schemes,” *Journal of International Development* 8, no. 2 (1996).

³⁹ *Ibid*, hal. 289-305.

Muhammad Kashif Khan Durrani, Dr. Abid Usman, Muhammad Imran Malik, Shfiq Ahmad - *Role of Micro Finance in Reducing Poverty: A Look at Social and Economic Factors*⁴⁰

Muhammad Kashif Khan Durrani dan kawan-kawan dalam jurnal ilmiah ini berhasil memberikan beberapa kesimpulan mengenai implementasi kredit mikro sebagai alat pengentas kemiskinan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Durrani dan kawan-kawan melakukan survey langsung kepada beberapa sampel wanita miskin-pedesaan di Pakistan. Terdapat beberapa kesimpulan yang perlu digaris bawahi dari hasil penelitian tersebut. Yang pertama, Sistem keuangan mikro dapat dikembangkan jika adanya negosiasi. Jika terjadi negosiasi dalam peningkatan suku bunga, maka adanya perkembangan sistem keuangan tersebut.

Yang kedua, tingkat literasi terhadap sistem keuangan di dalam masyarakat pedesaan masih sangat rendah. Maka dari itu, diperlukannya kampanye dan familiarisasi terhadap sistem keuangan itu sendiri. Yang ketiga, diperlukannya institusi yang berada pada bidang keuangan mikro ini. Hal ini dikarenakan signifikansi dampak dari keuangan mikro kepada masyarakat miskin-pedesaan. Terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Durrani dan kawan-kawan, adanya kesan baik dari 100% wanita miskin-pedesaan yang melakukan pinjaman kepada lembaga atau institusi keuangan mikro.

⁴⁰ Muhammad Kashif Khan Durrani et. al, “*Role of Micro Finance in Reducing Poverty: A Look at Social and Economic Factors*”, *International Journal of Business and Social Science* 2, Isu 21 (2011).

Peneliti secara garis besar melihat dua polaritas antara Woller dan Woodworth, Snow dan Buss, Khander *et. al.*, dan Durrani *et. al.*, yang mendukung model kredit mikro sebagai alat pengentas kemiskinan di negara berkembang. Sementara Karim dan Montgomery yang mengungkap sisi gelap dari sistem kredit mikro tersebut. Di sisi lain, Peneliti mengambil posisi optimis terhadap keberhasilan sistem permodalan kredit mikro dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Tentunya, setelah mengkaji keenam literatur tersebut ada beberapa *gap* yang memberikan ruang penelitian ini untuk semakin bereksplorasi. *Gap* ini kemudian akan menjadi ruang penulisan ini membawa perspektif baru pada nuansa penelitian kredit mikro.

Argumen yang dikeluarkan literatur yang mendukung keberhasilan kredit mikro dalam mengentas kemiskinan memiliki beberapa *gap*. Belum ada perspektif yang meneliti akan sistem kredit mikro yang dijalankan di bawah agenda pemerintah, atau lembaga pemerintah seperti PNM Mekaar. Karakteristik kemiskinan yang belum dibicarakan kemudian didatangkan oleh perspektif Montgomery. Di sisi lain, literatur yang mengkritik sistem kredit mikro belum membawa pula *sense* hubungan erat *social network* penduduk miskin negara berkembang. Dengan *gap* tersebut, Peneliti ini akan mencoba mengisi ruangan tersebut dengan penulisan ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Poverty

Pengentasan kemiskinan yang akan dianalisis dalam penulisan ini perlu ditopang dengan pengertian konsep “kemiskinan” atau “*poverty*” itu sendiri. Paul Spicker dan kawan-kawan melihat kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang begitu kompleks dan multidimensional.⁴¹ Hal ini dikarenakan seluruh dimensi manusia dan aspek sosialnya dapat dikaitkan dengan kemiskinan.⁴² Penelitian yang dilakukan Spicker dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa “kemiskinan” secara definitif tidak dapat disimpulkan dalam satu pengertian yang tetap. Hal ini dikarenakan perkembangan pandangan akan kondisi kemiskinan itu sendiri dari waktu ke waktu.⁴³ Akan tetapi pengupayaan pemahaman akan arti dan konsep kemiskinan juga dilakukan oleh pemerintah dan global.

Kemiskinan secara absolut biasanya dilihat berdasarkan pemenuhan kebutuhan secara material, bukan sosial.⁴⁴ The Copenhagen Declaration of the World Summit for Social Development juga berhasil mendesain konsep kemiskinan dengan 117 negara sebagai *signatories*.

“Absolute poverty is a condition characterized by severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, to social service.” (World Summit for Social Development, 1995)

Namun, perdebatan akan konsep kemiskinan juga muncul. Amartya Sen dan Peter Townsend (1983), berargumen bahwa konsep kemiskinan tersebut memudahkan

⁴¹ Paul Spicker, *Poverty: An International Glossary*, 2007, hal. 2.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hal. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 7.

esensi kemiskinan itu sendiri. Sen melihat jika kondisi kelaparan sudah terlihat, itu sudah merupakan kemiskinan, tanpa perlu melihat dan menimbang dimensi lainnya.⁴⁵

Definisi paling umum tentang kemiskinan dipaparkan oleh World Bank. Melalui *Handbook on Poverty and Inequality*, **kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam pemenuhan kesejahteraan.**⁴⁶ Kekurangan ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.⁴⁷ World Bank juga melihat kemiskinan itu sendiri memiliki dimensi yang cukup banyak. Ketidakmampuan seseorang terhadap akses ke pendidikan, kesehatan, kecukupan pangan, menciptakan kemiskinan yang multidimensi. Konsep ini juga merupakan pemahaman yang dianut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).⁴⁸

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian mengukur kemiskinan itu sendiri? World Bank melihat dalam mengukur kemiskinan diperlukan penetapan sebuah **indikator.**⁴⁹ Contohnya dengan membandingkan pemasukan masyarakat dengan rata-rata pemasukan per kapita.⁵⁰ Badan Pusat Statistik menetapkan indikator kemiskinan dengan Garis Kemiskinan (GK).⁵¹ Kondisi masyarakat yang berada di bawah GK, terhitung miskin. Dapat dilihat pandangan kemiskinan dan pengukurannya di Indonesia juga mengacu pada pemahaman

⁴⁵ Paul Spicker, *Poverty: An International Glossary*, 2007, hal. 7.

⁴⁶ Jonathan H. dan Shahidur R. Khandker, "Handbook on Poverty Inequality," *The World Bank* (2009), hal. 2.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan,"

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses pada 27 Desember 2021.

⁴⁹ Jonathan H. dan Shahidur R. Khandker, "Handbook on Poverty Inequality, Op.Cit., hal. 9.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Badan Pusat Statistik, Op.Cit.

World Bank. Pemahaman-pemahaman ini membawa pada bentuk konsep kemiskinan bahwa kemiskinan dapat dilihat sebagai kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjadi sejahtera. Berangkat dari itu, penelitian ini akan merujuk kemiskinan pada konsep tersebut.

The New Growth Theory

Definisi PNM Mekaar dalam agenda pembangunan pemerintah akan dijelaskan melalui kerangka *The New Growth Theory* oleh Robert Solow. Bermula dari artikelnya pada tahun 1957 yang berjudul “*Technical Change and the Aggregate Production Function*”, Solow memberikan paradigma barunya terhadap *development theories*.⁵² Premis utama yang diberikan Solow adalah pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya melihat peningkatan angka pendapatan, permodalan, atau tenaga kerja saja. Teknologi yang didefinisikan oleh Solow sebagai “pengetahuan” adalah kunci kesuksesan dari pembangunan itu sendiri.

Setiap masyarakat harus dibekali dengan sebuah *transfer knowledge* untuk menghasilkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan.⁵³ *The New Growth Theory* juga percaya bahwa peran pemerintah adalah penting dalam proses pembangunan ini.⁵⁴ Institusi yang berkapasitas dalam melakukan *transfer knowledge* tersebut adalah pemerintah. Solow melihat, memiliki pengetahuan adalah katalis endogen (internal) yang lebih melekat pada sebuah individu. Faktor

⁵² Richard Peet dan Elaine Hartwick, *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives* (New York etc.: Guilford Press, 2015), hal. 60-61.

⁵³ *Ibid*, hal. 61.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 63.

internal tentunya lebih permanen daripada kebijakan fiskal atau mekanisme pasar lainnya yang bersifat eksogen (eksternal). Model berpikir Solow memberikan argumen bahwa penanaman *knowledge* pada setiap pekerja atau penduduk adalah sebuah investasi. Hal ini dikarenakan, dengan penanganan dan jangka waktu yang tepat, pengetahuan ini akan menghasilkan *output* yang baik pula bagi pembangunan ekonomi negara.

Pandangan Solow sangat selaras dengan analisis dalam penulisan ini. Peranan Mekaar dalam agen pembangunan ekonomi negara merupakan sebuah inovasi perbankan. Tidak hanya itu, upayanya dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera juga aksi dari *transfer knowledge*. Pembekalan akan literasi finansial (akan dibahas pada bagian selanjutnya), adalah salah satu contohnya. *The New Growth Theory* juga percaya bahwa pembekalan teknologi ini kemudian dapat mendukung sebuah *collective interest* komunitas.⁵⁵ Penduduk miskin di Indonesia kerap melakukan banyak hal secara kolektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya. Kemajuan sebuah pengetahuan yang dapat berdampak pada *collective interest* juga dapat tercermin di PNM Mekaar. Maka dari itu, bersama jejak studi Solow penulisan ini akan meneliti PNM Mekaar melalui kacamata *The New Growth Theory*.

⁵⁵ Richard Peet dan Elaine Hartwick, *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives* (New York etc.: Guilford Press, 2015), hal. 62.

The Social Capital

Penelitian ini dipercaya akan lebih koheren jika dilakukan dengan menyentuh aspek *civil society* dengan *The Social Capital* sebagai kerangka utama. Memahami lebih jauh *The Social Capital*, terminologi teori ini diperkenalkan pertama kali oleh L. Judson Hanifan.⁵⁶ Pemahaman ini didapatkan Hanifan dari observasinya bahwa solusi isu sosial, ekonomi, dan politik dapat dijawab dengan keeratan *social network* yang ada dalam komunitas tersebut. Mengapa? Hanifan menyadari konflik sosial umumnya muncul karena perbedaan nilai dan adat, sehingga keeratan komunitas untuk saling memahami perbedaan tersebut semakin hilang. *Social network* seperti berupaya memunculkan keselarasan nilai-nilai tersebut.

Berlandaskan pemikiran ini, Robert D. Putnam mentranslasi *The Social Capital* dalam bentuk yang lebih komprehensif.⁵⁷ *Social capital* berdiri atas dua pilar elemen yang paling penting bagi Putnam; *Private Good* dan *Public Good*. Jangkauan sosial seorang individu akan berdampak pada *internal growth*, bahkan pendapatan individu tersebut. Seorang ekonom menyimpulkan pendapatan seseorang sangat dipengaruhi luas atau tidaknya jangkauan sosial orang tersebut. Modal sosial tersebut kemudian dapat digambarkan sebagai aset yang diinvestasikan untuk keuntungan individu tersebut, *Private Good*. Berbeda dengan aset internal, Putnam juga melihat modal sosial juga menguntungkan untuk bersama atau lingkup eksternal.

⁵⁶ Robert D. Putnam, *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society* (Oxford Univ. Press, 2004), hal. 4.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 6-9.

Putnam percaya akan kebaikan bersama dari modal sosial berdasarkan kajian rendahnya tingkat kriminalitas di lingkup yang memiliki keeratan sosial yang tinggi.⁵⁸ Untuk mendukung premis tersebut, Putnam berusaha menggambarkan konektivitas *social network* yang baik dengan komunitas yang bajik. Dimulai dari *trust* atau kepercayaan yang terbangun antar individu. “Saling percaya” ternyata menjadi pelumas interaksi sosial. Kepercayaan ini kemudian tumbuh menjadi hubungan *reciprocity* atau resiprokal. Timbal balik kebaikan yang dilakukan secara sirkuler. Hingga membentuk norma baik (*goodwill*) untuk satu sama lain. Putnam menganalogikan dengan.

“I’ll do this for you now without expecting anything immediately in return, because down the road you (or someone else) will reciprocate my goodwill”
(Putnam, 2004)

Resiprositas ini membentuk sebuah nilai yang dinamakan *norms of reciprocity*. Elemen inilah yang menjadi cikal bakal *civic virtue* atau komunitas yang bajik. *Civic virtue* dianggap mampu menyelesaikan dilema kolektif.⁵⁹ Konflik perbedaan, penyelewengan norma sosial (kriminalitas), bahkan mendorong aksi kolektif untuk kebaikan bersama, hal tersebut merupakan dilema kolektif dalam masyarakat. Kebaikan dalam komunitas yang dilakukan terus menerus kepada sesama menjadi buah manis yang dipetik komunitas itu sendiri. Modal sosial yang diinvestasikan itu pada akhirnya menjadi *Public Good*.

⁵⁸ Robert D. Putnam, *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society* (Oxford Univ. Press, 2004), hal. 7.

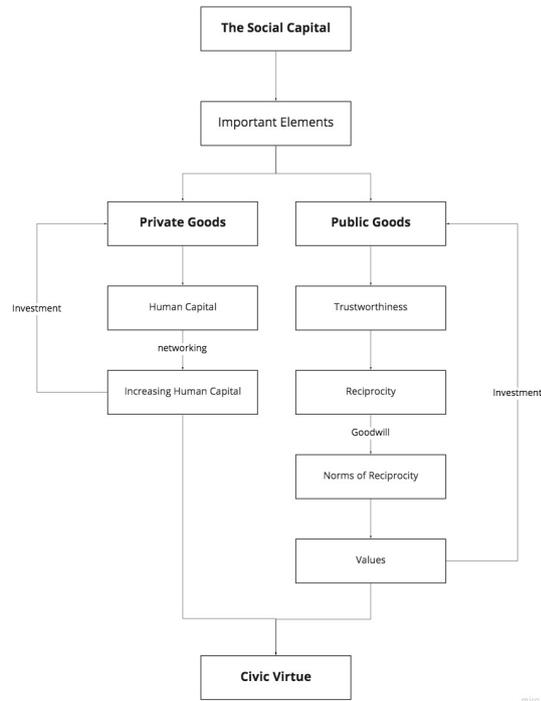
⁵⁹ *Ibid.*

Konsep itu saja belum cukup atau tidak *one-size-fits-all* dalam memahami kasus-kasus yang ada.⁶⁰ Karenanya terdapat 4 tipologi *social capital* menurut Putnam. *Formal vs Informal Social Capital*, dibedakan berdasarkan formal atau tidaknya keterikatan anggota dalam organisasi atau komunitas tersebut. *Thick vs Thin Social Capital*, dilihat berdasarkan kuat lemahnya hubungan antar satu dan yang lainnya. Kuat dan lemahnya hubungan tersebut dapat dilihat dari kesamaan tujuan. *Inward-looking vs Outward-looking Social Capital*, solidaritas suatu komunitas yang didasari dari faktor *inward* atau *outward*. Kesamaan latar belakang seperti kelas ekonomi dapat dilihat sebagai *inward-looking*. Tetapi komunitas pencinta lingkungan yang terbentuk karena fenomena perubahan iklim adalah *outward-looking*. *Bridging vs Bonding Social Capital*, distingsi dengan komunitas yang terbentuknya dengan kesamaan latar belakang sejak awal (*bonding*) atau adanya proses adaptasi dengan perbedaan latar belakang (*bridging*). Tidak dibatasi pula dua hal tersebut dapat diintegrasikan dalam sebuah fenomena sosial.⁶¹

⁶⁰ Robert D. Putnam, *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society* (Oxford Univ. Press, 2004), hal. 8.

⁶¹ *Ibid*, hal. 9-11.

Gambar 1.2 Bagan Konsep *The Social Capital*



Sumber: Bagan diolah sendiri

The Social Capital diharapkan tepat guna sebagai pisau analisis untuk menggambarkan implementasi metode kredit mikro pada Program Mekaar. Hal ini dikarenakan aspek-aspek seperti hubungan kolektif yang sangat ditekankan pada teori tersebut dapat menjelaskan sistem kerja metode kredit mikro yang sebagian besar adalah aspek sosial. Selain itu, *Social Capital* juga menyorot bagaimana mekanisme kredit mikro mengontrol kelancaran kreditnya dengan aspek sosial. Ketepatan lensa dari Putnam diharapkan dapat membedah kelebihan kredit mikro PNM Mekaar dalam mengentas kemiskinan.

Political Stakeholder (ST) Theory

Konsep untuk mendefinisikan peran PNM Mekaar dalam penelitian ini akan dilakukan melalui lensa *Political Stakeholder (ST) Theory* oleh Tricia D. Olsen. Olsen mengembangkan konsep tersebut dari pemikiran R. Edward Freeman. Freeman memperkenalkan *Stakeholder Theory* sebagai kerangka berpikir manajerial sebuah organisasi atau perusahaan.⁶² Freeman berusaha untuk menjelaskan apa itu *stakeholders*, peranannya, sistem pendanaannya, melalui kerangka yang dapat menampung fenomena turbulensi *stakeholders* di dalam lingkup organisasi tersebut.⁶³ Namun, perdebatan mengenai *ethicity* peran *stakeholders* dalam bisnis menjadi kritik dan perdebatan terhadap *Stakeholder Theory*.⁶⁴ Etis kah *stakeholder* yang berperan sepenuhnya demi keuntungan mereka belaka dengan tangan penuh pada kekuasaan organisasi tersebut?

Political Stakeholder (ST) Theory dihadirkan Olsen untuk menciptakan *nuance business ethics* dalam pendekatan *stakeholder*. Olsen sebelumnya menjelaskan bagaimana *state* memiliki peran unik, terutama dalam kemajuan pembangunan di negara-negara berkembang.⁶⁵ Olsen kemudian menarik pendekatan *stakeholder* dalam ranah sosial-politik menggunakan studi kasus *microfinance*.⁶⁶ Perkembangan *microfinance* mentransformasi upaya filantropis NGOs menjadi ladang “komersialisasi” pemerintah. Sehingga *state* juga

⁶² R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston: Pitman, 1984), hal. 3-5.

⁶³ *Ibid*, hal. 5.

⁶⁴ Robert Phillips, *Stakeholder Theory and Organizational Ethics* (San Francisco: Berren-Koehler Publishers Inc., 2005), hal. 4-6.

⁶⁵ Robert Phillips, *Stakeholder Theory and Organizational Ethics* (San Francisco: Berren-Koehler Publishers Inc., 2005), hal. 76-77.

⁶⁶ Tricia D. Olsen, “Political Stakeholder Theory: The State, Legitimacy, and the Ethics of Microfinance in Emerging Economies,” *Business Ethics Quarterly* 27, no. 1 (Mei, 2016), hal. 80.

digarisbawahi Olsen sebagai *stakeholder* utama dalam *microfinance* di perkembangan belakangan ini.⁶⁷ Kriteria ini mencerminkan unit analisis penelitian ini. Pemerintah Indonesia sebagai *stakeholder* dan PNM Mekaar sebagai organisasi *microfinance*.

Kelebihan *Political Stakeholder (ST) Theory* adalah kemampuannya dalam memberikan tipologi peranan organisasi (khususnya *microfinance*) dalam konteks pembangunan.⁶⁸ Olsen percaya bahwa *microfinance* mampu menjadi mesin *financial sustainability* dalam suatu negara. Tiga tipologi tersebut meliputi; *State-supported Model*, berbicara soal model keuangan mikro yang secara birokrasi dan orientasinya betul-betul diatur oleh pemerintah. *Bottom of the Pyramid Model*, kesempatan pendanaan dari pihak swasta yang lebih besar dan bergantung dengan keuntungan pinaman MFIs. *Hybrid Model*, menggabungkan *funding* pemerintah dan swasta.⁶⁹

Data Envelope Analysis (DEA)

Mengingat PNM Mekaar sebagai jasa permodalan, sisi keuangan juga perlu kita telik lagi. Peneliti membutuhkan sesuatu alat metode keuangan dalam mengukur sehat atau tidaknya bisnis PNM Mekaar. *Data Envelopment Analysis (DEA)* yang dipopulerkan oleh Berger dan Humphrey pada tahun 1997 dinilai

⁶⁷ Tricia D. Olsen, "Political Stakeholder Theory: The State, Legitimacy, and the Ethics of Microfinance in Emerging Economies," *Business Ethics Quarterly* 27, no. 1 (Mei, 2016), hal. 82.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 83.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 83-86.

efektif untuk menilai keungan *microfinance*.⁷⁰ Dalam artikel akademik yang ditulis oleh Begona Gutierrez-Nieto, Carlos Serrano-Cinca, Cecilio Mar Molinero yang berjudul *Microfinance Institutions and efficiency*, penelitian keuangan mikro dilakukan menggunakan DEA. Hal ini memperlihatkan *feasibility* analisis kredit mikro yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penggunaan DEA.

Pada dasarnya DEA memberikan mencoba melihat sepadannya *input* dan *output* yang meliputi; *debt/equity ratio*, *return on equity*, *average loan balance*, *current liabilities*, *cost per client*, dll.⁷¹ Berbeda dengan kerangka perbankan pada umumnya, DEA memberikan pendekatan tanpa adanya statistika. Karena itu metode ini menjadi tepat guna sebagai alat ukur institusi keuangan mikro yang tidak hanya melihat dari sisi perbankan tetapi juga dari sisi sosialnya. Melihat konteks PNM Mekaar yang banyak melibatkan *social network*, hal ini menjadikan DEA sangat *feasible*.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Melanjutkan penulisan ini, Peneliti akan menggunakan metode *case study design* atau **studi kasus**. Desain pemikiran studi kasus menyorot secara intensif analisis terhadap satu kasus.⁷² Secara konteks, definisi “kasus” pada desain

⁷⁰ Begoña Gutiérrez-Nieto, Carlos Serrano-Cinca, and Cecilio Mar Molinero, “Microfinance Institutions and Efficiency,” *Omega* 35, no. 2 (2007), hal 132-133.

⁷¹ *Ibid*, hal. 133.

⁷² Alan Bryman, *Social Research Methods 4E* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2012), hal.

pemikiran ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada lokasi tertentu.⁷³ Konsep ini dapat digambarkan dengan, contohnya, studi terhadap krisis moneter pada negara A. Peneliti harus berhati-hati, pendekatan *case study* dan *cross-sectoral* memiliki kemiripan dengan garis tipis diantaranya. Dua ciri khas utama yang dapat mendefinisikan pendekatan studi kasus; unit analisis dan metode analisis.⁷⁴ Metode studi kasus umumnya memiliki spesifik unit analisis di suatu lokasi. Dengan begitu variabelnya tidak berada pada dua tempat atau kejadian yang berbeda. Lalu umumnya metode yang digunakan berdasarkan penelitian kualitatif.⁷⁵

Secara kontekstual studi terhadap PNM Mekaar merupakan kasus agenda pengentasan yang sangat cocok dengan metode studi kasus. Mendefinisikan **Pemerintah Indonesia, PT PNM (Persero), dan PNM Mekaar** sebagai unit analisis penelitian ini. Dimana unit analisis tersebut berada pada titik lokasi kasus yang sama. Secara kualitatif akan dilihat lebih dalam tebalnya aspek sosial yang juga menjadi elemen penting dalam kredit mikro PNM Mekaar. Elemen tersebut akan dianalisis melalui kerangka pemikiran; *The New Growth Theory*, *The Social Capital*, *The Political Stakeholder (ST) Theory* dan kerangka DEA. Dengan kerangka tersebut akan dilihat sebetulnya peranan PNM Mekaar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

⁷³ Alan Bryman, *Social Research Methods 4E* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2012), hal. 67.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 68-69.

⁷⁵ *Ibid*.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian akan dilakukan secara kualitatif, Peneliti akan menggunakan upaya pengumpulan data melalui dua cara; *structured interview* dan *qualitative content analysis*. Wawancara terstruktur merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terstruktur dalam konteks ini berarti bagaimana wawancara dilakukan berdasarkan kebutuhan riset.⁷⁶ Analisis konten dilakukan dengan pengambilan data dari dokumen. Dokumen dalam konteks penelitian ini dapat dispesifikan dengan beberapa kriteria yakni; dapat terbaca, tersedia untuk dianalisis, dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁷⁷ Terdapat dua jenis dokumen yang akan digunakan untuk penelitian ini. *Official documents deriving from the state*, dokumen yang diambil dari sumber publikasi pemerintah.⁷⁸ Melihat unit analisis yang banyak melihat kebijakan pemerintah dalam pembangunan, dokumen kebijakan pemerintah seperti dokumen RPJMN akan digunakan dalam penelitian ini. *Virtual documents*, dokumen yang diambil berbasis internet.⁷⁹ *Annual Report* PT PNM (Persero) yang diambil dari internet dan beberapa jurnal dari situs internet banyak dipakai dalam penelitian ini.

⁷⁶ Alan Bryman, *Social Research Methods 4E* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2012), hal. 211.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 543.

⁷⁸ *Ibid*, hal, 549.

⁷⁹ *Ibid*, hal, 554.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 4 BAB yang secara sistematis mencapai tujuan penelitian penulisan ini. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I akan berfokus pada pendahuluan masalah dari penelitian ini. Bagian ini menjelaskan secara *general* kredit mikro dan kehadirannya dalam isu kemiskinan di dunia. Kemunculan kredit mikro ini juga akan dijelaskan keselarasannya dengan pembangunan berkelanjutan global. Sehingga terdapat pula penjelasan TPB tentang “Tanpa Kemiskinan” yang membicarakan permodalan kepada rakyat miskin. Latar belakang tersebut yang kemudian mendorong penelitian terhadap PNM Mekaar, kredit mikro milik pemerintah, yang berusaha mengentas kemiskinan dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Terdapat pula literatur guna pendukung relevansi pembahasan topik pada penelitian ini. Literatur-literatur tersebut juga berguna dalam memberikan *research gap* dalam pengambilan langkah peneliti. Adapula penjelasan mengenai kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai alat analisis terhadap unit-unit analisis penelitian ini. Terdapat lima kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam bagian ini; Konsep Kemiskinan, *The New Growth*, *The Political Stakeholder (ST) Theory*, Social Capital dan metode DEA.

Tentunya setelah itu terdapat BAB II yang secara lebih mendalam menjelaskan mengenai variabel utama yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini melalui lensa *The New Growth Theory: Agenda TPB Indonesia* dan peran PNM Mekaar di dalamnya. Penggambaran ini akan berupa penjelasan

secara komprehensif mengenai sistem, metode, hingga strategi dalam melawan kemiskinan yang dilakukan oleh PNM Mekaar sebagai institusi pemerintah. Serta dijelaskan pula perencanaan pembangunan negara melalui dokumen-dokumen milik pemerintah seperti TNP2K dan RPJMN. Peranan PNM Mekaar dalam dokumen tersebut akan dibantu jelaskan melalui *The Political Stakeholder (ST) Theory*, Penjelasan ini guna memberikan pemahaman mengenai konteks variabel yang akan dianalisis.

Setelah melihat proses implementasi tersebut, pada BAB III Peneliti ingin membuktikan melalui *The Social Capital* dan DEA, bagaimana peranan PNM Mekaar sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meretas kemiskinan dalam agenda pembangunannya? Peneliti akan menganalisis melalui elemen *social network* dari *The Social Capital*. Dan baik atau tidaknya lembaga keuangan kredit mikro tersebut menggunakan metode DEA. Dengan itu, Peneliti akan membuktikan hipotesis yang sebelumnya sudah disebutkan pula pada awal penelitian ini. Untuk menyimpulkan, bagian ini akan menjadi analisis utama dari penelitian ini.

Hingga pada akhirnya BAB IV yang kemudian akan menyimpulkan pembuktian hipotesis dalam penelitian ini. Secara sederhana pula, BAB IV akan memberikan sebuah jawaban terhadap pertanyaan penelitian di awal karya ini. Bagaimana peranan kredit mikro PNM Mekaar sebagai alat pengentas kemiskinan di Indonesia? Peranan yang seperti apa sehingga PNM Mekaar sebagai agen pembangunan pemerintah dinyatakan berhasil. Secara komprehensif hasil kesimpulan ini akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

